

## ABSTRAK

Pantai Busung merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Simeulue, pantai ini terus mengalami tren peningkatan kunjungan wisatawan karena memiliki keindahan dan memiliki potensi yang besar. Pada tahun 2023 jumlah wisatawan berjumlah sebanyak 46.337 orang. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, di tengah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat justru realisasi kebijakan pengembangan Pantai Busung belum berjalan optimal. Meskipun pemerintah daerah saat ini telah memiliki regulasi, namun tahap pelaksanaan kebijakan belum berjalan efektif dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial secara merata. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Busung di Kabupaten Simeulue, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata Pantai Busung di Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengembangan objek wisata Pantai Busung dilakukan melalui koordinasi antar lintas sektor berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kepariwisata yang menekankan pengembangan pariwisata berbasis keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan promosi wisata, serta pengembangan fasilitas pendukung pariwisata. Selain itu, pemerintah juga melakukan promosi wisata melalui media sosial dan menetapkan Pantai Busung sebagai objek wisata prioritas daerah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam pengembangan wisata, namun dinas terkait masih menghadapi kendala berupa tidak tersedianya staf khusus yang ahli di bidang pemasaran pariwisata serta keterbatasan anggaran, sehingga pengembangan Pantai Busung belum berjalan maksimal. Faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan lingkungan atau perilaku wisatawan.

Kata kunci: kebijakan, implementasi, pemerintah, pengembangan

## **ABSTRACT**

*Busung Beach is one of the tourist destinations located in Simeulue Regency. This beach continues to experience an increasing trend in tourist visits due to its natural beauty and great tourism potential. In 2023, the number of tourists reached 46,337 visitors. This condition should become a concern for the government because, amid the increasing number of tourist visits, the realization of policies for the development of Busung Beach has not yet been optimal. Although the local government currently has regulations in place, the implementation stage of the policy has not been effective in encouraging equitable economic and social development. The purpose of this study is to determine how government policies are implemented in the development of Busung Beach tourism object in Simeulue Regency and to identify the inhibiting factors in the implementation of government policies for the development of Busung Beach tourism object in Simeulue Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Simeulue Regency government policy in the development of Busung Beach tourism object is carried out through cross-sectoral coordination based on Qanun of Simeulue Regency Number 12 of 2015 concerning Tourism, which emphasizes sustainable tourism development, community empowerment, tourism promotion enhancement, and the development of supporting tourism facilities. In addition, the government also promotes tourism through social media and has designated Busung Beach as a regional tourism priority destination. This demonstrates the government's commitment to tourism development. However, the related agencies still face obstacles, such as the absence of specialized staff with expertise in tourism marketing and limited budget allocation, resulting in the development of Busung Beach not being fully optimized. The inhibiting factors encountered include limited resources, weak inter-agency coordination, and environmental conditions or tourist behavior.*

*Keywords: policy, implementation, government, development*